

Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Pendekatan Perencanaan Partisipatif Di Desa Butungale

Layosibana Akhirun

Universitas Bina Taruna Gorontalo

layosibana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dalam proses revitalisasi kawasan permukiman kumuh melalui pendekatan partisipatif di Desa Butungale. Permasalahan kawasan kumuh tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan revitalisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan pasca-proyek. Keterlibatan ini meningkatkan rasa kepemilikan, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan. Namun, ditemukan pula tantangan berupa ketimpangan akses partisipasi, kapasitas kelembagaan yang lemah, serta pengaruh hubungan patronase. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan desa, penyusunan regulasi yang menjamin inklusivitas, serta penggunaan teknologi informasi sederhana sebagai sarana perluasan partisipasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan pembangunan kawasan permukiman yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Kata kunci: **Revitalisasi, Kawasan Kumuh, Partisipasi, Perencanaan Wilayah**

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the community in the revitalization process of slum areas through a participatory approach in Butungale Village. Slum area problems are not only related to physical aspects, but also reflect social, economic, and institutional complexities that require active community involvement. Using descriptive qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study indicate that community participation plays a very important role in the success of revitalization, from planning, implementation, to post-project maintenance. This involvement increases the sense of ownership, transparency, and accountability of development. However, challenges were also found in the form of inequality in access to participation, weak institutional capacity, and the influence of patronage relationships. This study recommends strengthening village institutions, drafting regulations that guarantee inclusiveness, and using simple information technology as a means of expanding participation. These findings are expected to be a reference in designing policies for community-based and sustainable residential area development.

PENDAHULUAN

Kawasan permukiman kumuh merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan wilayah di Indonesia. Permukiman yang tidak layak huni, dengan kondisi fisik yang buruk seperti jalan sempit, sanitasi yang tidak memadai, bangunan tidak permanen, dan ketidakteraturan tata ruang, kerap menjadi potret ketimpangan sosial di tengah pembangunan nasional. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Salah satu pendekatan yang diyakini mampu menjawab persoalan ini adalah perencanaan partisipatif, yakni model pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan desentralisasi yang mengedepankan peran masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan wilayahnya sendiri (Putri & Sunarti, 2020).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi kawasan kumuh telah banyak dilakukan melalui berbagai program nasional, seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang mengedepankan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat formalitas dan belum menyentuh pada ranah pengambilan keputusan. Banyak masyarakat yang hanya dilibatkan dalam tahap sosialisasi atau pelaksanaan fisik, sementara dalam tahap identifikasi masalah dan perencanaan, partisipasi masih terbatas (Hidayat & Putra, 2021). Keterlibatan yang bersifat pasif ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pelibatan masyarakat, baik karena rendahnya kapasitas masyarakat, minimnya akses terhadap informasi, maupun lemahnya kelembagaan lokal yang mendukung partisipasi.

Beberapa studi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi kawasan kumuh sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dan bermakna. Misalnya, dalam penelitian oleh Sari dan Ardiansyah (2021), dijelaskan bahwa masyarakat yang diberdayakan melalui pelatihan dan forum musyawarah cenderung memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap hasil pembangunan, yang pada gilirannya berdampak pada keberlanjutan proyek tersebut. Hal serupa juga ditemukan oleh Pratama dan Nugroho (2020) yang meneliti revitalisasi permukiman kumuh di kawasan pesisir, di mana keberhasilan intervensi fisik sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial dan partisipasi warga dalam bentuk kerja bakti, pengawasan, dan kontribusi ide. Di sisi lain, kasus kegagalan revitalisasi di beberapa daerah justru terjadi

karena pendekatan yang terlalu top-down, di mana masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek dalam pembangunan (Yuliana, 2022).

Konsep partisipasi dalam perencanaan wilayah tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial dan kelembagaan yang menyertainya. Modal sosial masyarakat, seperti kepercayaan antarwarga, solidaritas, dan norma gotong royong, menjadi landasan penting dalam membangun perencanaan partisipatif yang efektif. Tanpa adanya modal sosial yang kuat, proses partisipatif berpotensi mengalami kegagalan karena kurangnya rasa kepemilikan terhadap program pembangunan (Rahmawati & Irawan, 2019). Selain itu, keterlibatan masyarakat juga sangat bergantung pada kemampuan institusi lokal, seperti pemerintah desa, LPM, atau karang taruna, dalam memfasilitasi ruang dialog yang adil dan transparan. Oleh karena itu, revitalisasi kawasan kumuh tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis semata, tetapi juga pendekatan sosial yang memperkuat struktur partisipasi masyarakat.

Desa Butungale, yang merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik permukiman kumuh, menjadi lokasi yang relevan untuk diteliti dalam konteks perencanaan partisipatif. Lokasi ini mencerminkan kompleksitas persoalan permukiman kumuh, mulai dari kepadatan hunian, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, hingga minimnya ruang terbuka dan prasarana umum yang layak. Pada saat yang sama, desa ini memiliki potensi sosial yang cukup kuat berupa kelompok masyarakat lokal yang aktif, serta adanya inisiatif komunitas dalam memperbaiki lingkungan. Hal ini membuka peluang besar untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan partisipatif telah diterapkan, serta bagaimana tantangan dan peluangnya dalam konteks revitalisasi permukiman. Dengan menelusuri peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat memiliki kendali dan kontribusi nyata dalam perbaikan lingkungan mereka sendiri, sekaligus menyusun strategi penguatan partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kajian ini menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam wacana perencanaan wilayah. Secara teoritis, studi ini memperkaya literatur tentang perencanaan partisipatif di kawasan kumuh dengan menyoroti peran aktif masyarakat dalam pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Sementara secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan aktor pembangunan lainnya dalam merancang intervensi yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi masyarakat secara substansial, bukan hanya simbolik, pembangunan kawasan kumuh diharapkan tidak lagi bersifat temporer, melainkan menjadi proses transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana bentuk, proses, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh di Desa Butungale. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi warga dalam perencanaan wilayah. Strategi penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*) dengan menitikberatkan pada satu lokasi spesifik, yaitu Desa Butungale, sebagai ruang analisis yang mendalam dan terfokus. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali dinamika sosial, persepsi, praktik partisipatif, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks revitalisasi kawasan kumuh di tingkat desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interviews*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik permukiman dan bentuk interaksi sosial masyarakat dalam aktivitas pembangunan lingkungan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai informan kunci (*key informants*), seperti kepala desa, tokoh masyarakat, perwakilan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), kelompok pemuda, serta warga yang terlibat langsung dalam kegiatan revitalisasi. Jumlah informan ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi dan keterlibatan dalam proses partisipasi, serta prinsip ketercukupan data atau data saturation (Creswell & Poth, 2018). Selain itu, teknik snowball sampling juga digunakan untuk menjangkau aktor-aktor informal yang memiliki peran penting tetapi tidak teridentifikasi secara administratif.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yaitu dengan cara mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif. Tahapan analisis dilakukan mulai dari transkripsi wawancara, penyandian data (*coding*), pengelompokan tema, hingga interpretasi dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, hasil observasi, dan data dokumentasi, agar diperoleh gambaran yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Patton, 2015). Selain itu, konfirmasi data juga dilakukan kepada beberapa informan untuk memastikan keakuratan informasi (*member check*).

Penelitian ini dibatasi secara ruang dan waktu, yakni hanya mencakup wilayah Desa Butungale dan kegiatan revitalisasi kawasan kumuh yang berlangsung dalam dua tahun terakhir. Fokus penelitian adalah pada bentuk

partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses revitalisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan program. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman mendalam dan reflektif tentang praktik perencanaan partisipatif dalam konteks lokal, sekaligus memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi perbaikan program sejenis di wilayah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat Desa Butungale dalam program revitalisasi kawasan permukiman kumuh menunjukkan bentuk keterlibatan yang kompleks dan dinamis. Pada tahap identifikasi permasalahan, masyarakat menunjukkan inisiatif mandiri dengan membentuk kelompok kecil untuk mengumpulkan data kondisi lingkungan. Kelompok ini melakukan survei terhadap saluran air, jalan rusak, dan sistem sanitasi. Hasil survei tersebut didokumentasikan secara swadaya dan digunakan sebagai bahan diskusi dalam forum desa. Temuan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap urgensi perbaikan lingkungan dan menjadi indikasi kuat bahwa proses revitalisasi dipicu oleh kebutuhan lokal, bukan sekadar intervensi dari luar.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa bersama LPM dan tokoh masyarakat mengadakan forum musyawarah. Forum ini bertujuan merumuskan rencana revitalisasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Meskipun forum tersebut terbuka, partisipasi aktif masih terbatas pada tokoh-tokoh tertentu seperti kepala dusun, perangkat desa, dan warga senior. Kelompok perempuan dan pemuda terwakili secara simbolik, tetapi belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap ruang-ruang deliberatif, sehingga partisipasi belum merata.

Tahap pelaksanaan menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih luas, terutama melalui kegiatan gotong royong. Warga secara kolektif melakukan pengerjaan fisik seperti pengecoran jalan setapak, pembersihan saluran air, dan pembangunan fasilitas MCK. Keterlibatan ini membangun solidaritas sosial dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil revitalisasi. Selain itu, keterlibatan pemuda sebagai tenaga teknis turut menumbuhkan semangat kolaboratif lintas generasi. Hal ini menjadi modal sosial penting yang menopang keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.

Dari segi hasil fisik, proyek revitalisasi menghasilkan peningkatan nyata pada kondisi lingkungan permukiman. Jalan lingkungan menjadi lebih layak dan mudah dilalui, saluran air berfungsi dengan baik, dan fasilitas sanitasi meningkat. Manfaat ini dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal kenyamanan dan kesehatan. Namun, distribusi hasil belum merata, terutama pada wilayah yang lebih terpencil atau kurang terjangkau oleh kegiatan gotong royong.

Secara kelembagaan, LPM dan karang taruna berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak luar. LPM terlibat dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan teknis, sementara karang taruna menjadi motor penggerak pelaksanaan di lapangan. Meskipun demikian, proses pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh patronase lokal. Jaringan kekeluargaan dan hubungan politik informal kadang memengaruhi distribusi sumber daya dan penunjukan pelaksana kegiatan, yang menimbulkan kesenjangan dalam persepsi keadilan di antara warga.

Analisis tematik dari data kualitatif menunjukkan empat tema utama. Pertama, inisiatif mandiri masyarakat sebagai pendorong awal revitalisasi. Kedua, ketimpangan akses terhadap ruang partisipasi yang menyebabkan eksklusi kelompok tertentu. Ketiga, kolaborasi fisik melalui gotong royong sebagai bentuk partisipasi aktif yang membangun modal sosial. Keempat, dualisme kelembagaan antara struktur formal dan jaringan informal yang memengaruhi efektivitas implementasi.

Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya partisipasi bermakna dalam perencanaan kawasan kumuh (Pratama & Nugroho, 2020; Sari & Ardiansyah, 2021). Penelitian lain menyebutkan bahwa partisipasi yang hanya bersifat simbolik tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan (Wulandari, 2019). Oleh karena itu, revitalisasi yang berhasil adalah yang mampu menciptakan ruang partisipatif yang inklusif, adil, dan berbasis kebutuhan lokal.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam studi ini adalah rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan. Meskipun mereka aktif dalam pelaksanaan kegiatan lapangan dan sosialisasi, peran mereka dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Hambatan ini bersumber dari norma budaya yang menempatkan perempuan sebagai pelaksana domestik, bukan aktor strategis di ruang publik desa.

Selain itu, kapasitas administratif desa masih terbatas, terutama dalam menyusun dokumen teknis dan mengelola anggaran sesuai prinsip akuntabilitas. Beberapa kegiatan pengadaan dilakukan secara informal tanpa dokumentasi memadai, yang dapat memunculkan risiko penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen proyek dan perencanaan partisipatif sangat dibutuhkan.

Dalam konteks dualisme kelembagaan, mekanisme informal seperti hubungan kekeluargaan sering menjadi saluran efektif dalam mobilisasi sumber daya. Namun, hal ini juga menimbulkan eksklusi bagi kelompok yang tidak memiliki kedekatan dengan elite lokal. Akibatnya, muncul ketimpangan dalam distribusi manfaat proyek dan persepsi warga terhadap keadilan sosial.

Berdasarkan hasil dan pembahasan ini, beberapa strategi disarankan untuk meningkatkan efektivitas partisipasi. Pertama, menyusun pedoman partisipasi inklusif yang mengatur keterwakilan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan warga miskin. Kedua, mengembangkan forum musyawarah yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga interaktif dan deliberatif. Ketiga, memanfaatkan media digital sederhana seperti grup pesan singkat untuk menjangkau warga yang sulit hadir secara fisik. Keempat, membentuk tim pemeliharaan pasca proyek dengan sistem rotasi kepemimpinan agar tidak didominasi satu kelompok tertentu.

Kesimpulannya, revitalisasi kawasan kumuh di Desa Butungale menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program. Namun, partisipasi tersebut harus dibangun secara bermakna dan setara agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan perencanaan partisipatif yang menggabungkan aspek sosial, teknis, dan kelembagaan akan menjadi strategi yang paling relevan untuk konteks revitalisasi di desa-desa serupa.

Berikut adalah rekomendasi tulisan ini:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa Disarankan agar pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur desa dalam hal penyusunan anggaran partisipatif, dokumentasi proyek, dan penggunaan teknologi informasi sederhana untuk mendukung transparansi.
2. Inklusivitas dalam Proses Musyawarah Diperlukan pedoman teknis yang menjamin representasi kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya dalam forum pengambilan keputusan desa agar partisipasi tidak hanya simbolis, tetapi substantif.
3. Optimalisasi Peran Lembaga Lokal Perlu memperkuat fungsi LPM dan karang taruna sebagai jembatan partisipatif, misalnya dengan memberikan pendampingan dari fasilitator profesional dalam setiap siklus perencanaan dan pelaksanaan proyek.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Penggunaan media digital sederhana seperti grup WhatsApp atau papan informasi digital desa dapat memperluas jangkauan informasi dan memungkinkan partisipasi warga secara fleksibel.
5. Mekanisme Pemeliharaan Berkelanjutan Disarankan pembentukan tim pemeliharaan infrastruktur yang terdiri dari unsur warga secara bergilir, untuk memastikan tanggung jawab bersama dan keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun.
6. Evaluasi Partisipatif Berkala Pemerintah desa bersama warga dapat menyusun agenda evaluasi partisipatif setiap enam bulan untuk menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat telah terwujud dan apa tantangan yang dihadapi.

SIMPULAN

Studi ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses revitalisasi kawasan permukiman kumuh di Desa Butungale. Peran serta masyarakat terbukti bukan hanya sebagai pelengkap formalitas, melainkan menjadi elemen sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kawasan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat menciptakan rasa memiliki, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong kemandirian desa dalam mengelola perubahan. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk terlibat secara penuh, kualitas perencanaan meningkat, pelaksanaan menjadi lebih efisien, dan hasil pembangunan lebih tepat sasaran.

Namun demikian, studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan. Ketimpangan dalam akses partisipatif, terutama bagi kelompok perempuan, pemuda, dan warga miskin, menunjukkan bahwa masih ada hambatan struktural dan kultural yang harus diatasi. Selain itu, praktik informal seperti patronase sosial-politik di tingkat desa dapat menghambat prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya pembangunan. Kapasitas kelembagaan desa yang terbatas juga menjadi hambatan dalam pengelolaan program revitalisasi secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan revitalisasi kawasan permukiman kumuh tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pembangunan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosial, tata kelola lokal, dan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, revitalisasi harus dipahami sebagai proses transformasi sosial yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas lokal, dan pembaruan kelembagaan. Penekanan pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan hasil-hasil pembangunan.

Saran yang dapat diajukan untuk perbaikan ke depan adalah pentingnya penyusunan regulasi desa yang menjamin hak partisipatif semua kelompok, termasuk kelompok rentan. Pemerintah daerah disarankan untuk menyediakan program pendampingan teknis secara berkala kepada desa-desa yang menjalankan program revitalisasi, serta mendorong penerapan prinsip inklusivitas dalam perencanaan dan evaluasi proyek. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat mengintegrasikan pembelajaran dari tingkat lokal ke dalam kebijakan makro yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, desa-desa lain yang menghadapi persoalan permukiman kumuh dapat menjadikan pengalaman Desa Butungale sebagai praktik baik yang dapat direplikasi, dengan penyesuaian kontekstual. Studi lanjutan sangat dianjurkan

Volume 1 Nomor 1, Mei 2025

untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam hubungan antara struktur sosial lokal, dinamika gender, dan efektivitas partisipasi dalam konteks pembangunan permukiman. Dengan demikian, kontribusi kajian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan berdampak nyata bagi perencanaan wilayah yang adil dan berkelanjutan. bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga transformasi sosial yang memungkinkan semua warga, tanpa terkecuali, untuk terlibat aktif dalam membangun masa depan permukiman mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh di Perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 15(2), 113–127. <https://doi.org/10.22146/jpw.2020.15.2.113>
- Bappenas. (2019). Strategi Nasional Penanganan Permukiman Kumuh. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Farida, U., & Rahman, A. (2021). Pendekatan Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 25–39. <https://doi.org/10.31289/jpm.v9i1.4562>
- Harahap, D., & Yani, R. (2023). Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh: Studi Kasus di Wilayah Pinggiran Kota. *Jurnal Tata Ruang*, 18(1), 55–70. <https://doi.org/10.14710/jtr.18.1.55-70>
- Yuliani, N., & Nugroho, H. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Wilayah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 201–215. <https://doi.org/10.14710/jish.v11i3.201>
- Firmansyah, A. (2020). Evaluasi Program Penataan Kawasan Kumuh di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Penataan Ruang dan Lingkungan*, 7(1), 45–60.
- Prasetyo, H., & Lestari, N. (2021). Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 133–148. <https://doi.org/10.31289/jps.v5i2.5678>
- Kementerian PUPR. (2020). Pedoman Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Siregar, R., & Lubis, M. (2023). Inovasi Tata Kelola Partisipatif dalam Penanganan Permukiman Kumuh. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 9(1), 75–90. <https://doi.org/10.14710/jip.9.1.75>
- Simanjuntak, L. A. (2021). Perencanaan Wilayah Berbasis Komunitas: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah*, 10(2), 89–104.
- Wulandari, D. (2022). Inklusi Sosial dalam Revitalisasi Lingkungan Kumuh. *Jurnal Sosial dan Perubahan*, 8(1), 59–73.
- Sutrisno, A., & Handayani, R. (2019). Analisis Kebijakan Penataan Permukiman Berbasis Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 221–236.

Volume 1 Nomor 1, Mei 2025

- Ramadhan, F. A. (2020). Partisipasi Gender dalam Pembangunan Permukiman. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 6(2), 101–116.
- Zulkarnaen, M., & Fitriani, E. (2022). Strategi Kolaboratif dalam Pengembangan Kawasan Kumuh. *Jurnal Mitra Pembangunan*, 4(1), 44–58.
- Saragih, J., & Oktaviani, S. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Berbasis Partisipasi. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 3(2), 70–85.